



PENDOPO

Jangan Anggap Enteng Keuangan

GUBERNUR Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah, pejabat berwenang, bupati dan wali kota tidak menganggap enteng persoalan yang menyangkut pengelolaan keuangan.

"Jangan dianggap sepele. Harus taat pada undang-undang," ujar Cornelis di Kantor Perwakilan BPK RI, Senin (30/9). Jika BPK RI menyatakan adanya hal-hal yang harus diselesaikan atau diperbaiki, kata Cornelis, pihak-pihak terkait harus serius menyelesaikannya. Konsultasi dan koordinasi dengan BPK RI harus terus dilakukan. "Jangan sampai ada bargaining menyangkut uang," katanya.

Cornelis juga berterima kasih atas kerjasama dan bantuan BPK RI dalam pengelolaan keuangan. Atas koordinasi yang terus dilakukan, Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, Pemkab Sintang, dan Pemkab Sekadau berhasil mengelola keuangana dengan baik dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. "Terima kasih atas kerjasamanya kepada Bapak Adi Sudiby," ujar Cornelis saat serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar dari Adi Sudiby kepada Didi Budi Satrio, kemarin. Ia juga berharap Kepala BPK RI yang baru dapat bekerjasama dalam mengawali jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kalbar.

Anggota BPK RI Moermahadi Soerja Djane-gara menuturkan ada empat poin penting bagi pemprov maupun kabupaten dan kota untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan pengungkapan, yakni perencanaan dan pelaksanaan audit laporan keuangan entitas sektor publik. "Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan terakhir efektivitas pengendalian internal," katanya. *(uni)*



Cornelis